

**RELASI ORGANISASI SAYAP PEREMPUAN PARTAI DENGAN  
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Marsha Dhita Pytaloka**

**NPM 2226021001**



**PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### RELASI ORGANISASI SAYAP PEREMPUAN DENGAN PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024

Oleh  
**Marsha Dhita Pytaloka**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara Organisasi Sayap Perempuan (OSP) dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah serta menganalisis pengaruh relasi tersebut terhadap pengambilan kebijakan partai pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya posisi strategis organisasi sayap perempuan dalam struktur partai politik, meskipun keberadaannya memiliki peran penting dalam mobilisasi politik dan representasi perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus partai, pengurus organisasi sayap perempuan, kader perempuan, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teori *Networking Institutionalism*, teori representasi politik perempuan, dan teori partisipasi politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara OSP dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah bersifat interdependen namun asimetris. OSP memiliki peran penting dalam sosialisasi politik, mobilisasi massa, dan penguatan basis elektoral perempuan, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam akses pengambilan keputusan strategis partai. Pengaruh OSP terhadap kebijakan partai terlihat melalui dukungan terhadap kebijakan afirmatif perempuan, penerapan kuota keterwakilan perempuan, dan penguatan kaderisasi politik perempuan. Namun demikian, pengaruh tersebut masih bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya menentukan arah kebijakan partai secara substantif karena dominasi elite partai dan budaya politik patriarkal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan OSP belum sepenuhnya otonom dalam struktur partai politik, tetapi memiliki kontribusi penting dalam memperkuat representasi politik perempuan dan kualitas demokrasi internal partai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal partai, peningkatan posisi strategis perempuan, dan penguatan kaderisasi politik perempuan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** organisasi sayap perempuan, partai politik, representasi perempuan, pengambilan kebijakan, *Networking Institutionalism*.

## **ABSTRACT**

### ***THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN'S WING ORGANIZATIONS AND THE GOLKAR PARTY IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTION***

By

***Marsha Dhita Pytaloka***

*This study aims to analyze the relationship between the Women's Wing Organization (OSP) and the Golkar Party in Central Lampung Regency, as well as to examine the influence of this relationship on party policy-making in the 2024 Legislative Election. The study is motivated by the limited strategic position of women's wing organizations within political party structures, despite their important role in political mobilization and women's representation.*

*This research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving party administrators, women's wing organization leaders, female cadres, and other related parties. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the theories of Networking Institutionalism, women's political representation, and political participation.*

*The findings indicate that the relationship between the women's wing organization and the Golkar Party in Central Lampung Regency is interdependent yet asymmetrical. The women's wing organization plays a significant role in political socialization, mass mobilization, and strengthening the female electoral base, but it still has limited access to strategic party decision-making. The influence of the organization on party policies can be seen through support for affirmative policies for women, the implementation of women's representation quotas, and the strengthening of women's political cadre development. However, such influence remains consultative and has not fully determined substantive party policies due to the dominance of party elites and patriarchal political culture.*

*This study concludes that women's wing organizations are not yet fully autonomous within political party structures, although they contribute significantly to strengthening women's political representation and the quality of internal party democracy. Therefore, strengthening internal party regulations, increasing women's strategic positions, and reinforcing sustainable political cadre development for women are necessary.*

***Keywords:*** *women's wing organization, political party, women's representation, policy-making, Networking Institutionalism.*

**RELASI ORGANISASI SAYAP PEREMPUAN PARTAI DENGAN  
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

**Oleh**

**Marsha Dhita Pytaloka**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Mencapai Gelar MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan**



**PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis : **RELASI ORGANISASI SAYAP PEREMPUAN  
PARTAI DENGAN PARTAI GOLONGAN KARYA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

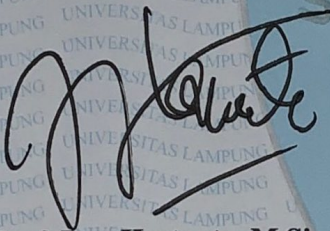
Nama Mahasiswa : **Marsha Dhita Pytaloka**  
NPM : **2226021001**  
Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

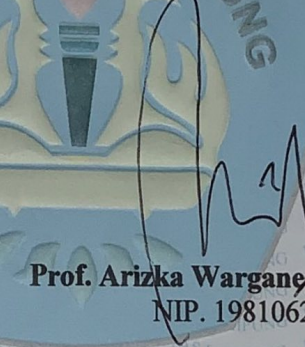
**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

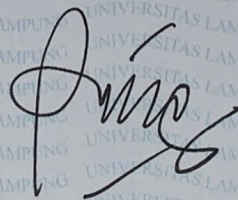


**Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 196010101986031006



**Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**  
NIP. 198106202006041003

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 196902191994032001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**

**Sekretaris : Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Ari Darmasuti, M.A**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 19760821200093201**

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

**NIP. 196403261989021001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 06 Mei 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “RELASI ORGANISASI SAYAP PEREMPUAN PARTAI DENGAN PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**MARSHA DHITA PYTALOKA**

NPM 2226021001

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Marsha Dhita Pytaloka, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 8 September 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak di TK Islam Terpadu Bustanul Ulum Yukum Jaya. Penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Brawijaya. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan S1, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan internal maupun *volunteer* di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) dan organisasi eksternal kampus seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Saat ini, penulis diamanatkan untuk menjadi legislator di DPRD Provinsi Lampung mewakili Daerah Pemilihan VII Kabupaten Lampung Tengah. Penulis merupakan anggota Fraksi Golongan Karya dan menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di Komisi V yang berfokus pada sektor kesejahteraan rakyat.

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya dedikasikan untuk Ibunda tercinta

**Bunda Mardiana**

Sosok yang meski hak pendidikannya terenggut oleh keterbatasan sistemik masa lalu, namun tetap teguh menjadi katalisator bagi putri-putrinya. Terima kasih telah memutus rantai ketidakberdayaan dan memastikan kami tumbuh menjadi perempuan yang memiliki otonomi serta peluang seluas-luasnya.

## **MOTTO**

*“You have to transcend the apprehension of change. Change is the only constant in the universe.”*

(Anda harus melampaui rasa takut akan perubahan. Perubahan adalah satu-satunya ketetapan di alam semesta.)

- Sheldon Cooper (*The Big Bang Theory*, Season 7, Episode 12)

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul: “Relasi Organisasi Sayap Perempuan Partai dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini banyak memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Prof. Dr. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, kritik, saran, motivasi dan bimbingan selama penyusunan tesis.
5. Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. Ari Darmasuti, M.A., selaku Penguji Utama atas masukan, kritik, dan inspirasinya terkait kajian politik perempuan selama penyusunan tesis.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

8. Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dan Organisasi Sayap Perempuan yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Suami tercinta Tommy Ariansyah dan buah hati Yasmine Maheera atas dukungan, doa dan kasih sayang yang telah memotivasi dan memberikan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis dan proses pendidikan di Magister Ilmu Pemerintahan ini.
10. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan.
11. Seluruh rekan seperjuangan di Magister Ilmu Pemerintahan 2022 Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, akan tetapi semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik perempuan dan organisasi partai politik.

Bandar Lampung, 06 Mei 2026

Penulis,

**Marsha Dhita Pytaloka**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
II   TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Kerangka Konsep .....	11
2.1.1 Partai Politik .....	11
2.1.2 Organisasi Sayap Partai .....	16
2.1.3 Partisipasi Politik .....	22
2.1.4 Representasi Politik Perempuan .....	24
2.1.5 Politik Formal dan Informal dalam Relasi Kelembagaan Partai .....	27
2.2 Kerangka Teori .....	28
2.2.1 Teori <i>Networking Institutionalism</i> .....	28
2.2.2 Karakteristik <i>Networking Institutionalism</i> .....	29
2.2.3 Dimensi <i>Networking Institutionalism</i> dalam Penelitian .....	30
2.2.4 Integrasi dengan Partisipasi dan Representasi Politik .....	32
2.2.5 Relevansi Teori dengan Penelitian .....	33
2.3 Kerangka Pikir .....	36

III	METODE PENELITIAN .....	38
	3.1. Tipe Penelitian .....	38
	3.2. Fokus Penelitian.....	39
	3.3. Lokasi Penelitian .....	40
	3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	42
	3.5. Penentuan Jenis Informan.....	43
	3.6. Teknik Pengolahan Data.....	45
	3.7. Teknik Analisa Data .....	46
	3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum .....	51
	4.1.1 Profil Kelembagaan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah .....	51
	4.1.2 Organisasi Sayap Perempuan .....	59
	4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	67
	4.2.1 Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Golkar dalam Perspektif <i>Networking Institutionalism</i> .....	68
	4.2.2 Pengaruh Relasi terhadap Representasi Politik Perempuan .	78
	4.2.3 Pembahasan .....	95
V.	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Simpulan .....	110
	5.2 Saran .....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Pikir .....	37
Gambar 2. Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Lampung Tengah .	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Organisasi Sayap Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah .....	4
Tabel 2.	Informan Penelitian .....	44
Tabel 3.	Relasi organisasi sayap perempuan dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dapat dioperasionalkan ke dalam lima dimensi teori <i>Networking Institutionalism</i> .....	66
Tabel 4.	Penempatan Calon Legislatif Perempuan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah pada Pileg 2024 (Data Terbuka) .....	80
Tabel 5.	Pengaruh Relasi dalam Lima Dimensi .....	88
Tabel 6.	Perbandingan Regulasi Formal dan Implementasi Lapangan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah .....	89

## DAFTAR SINGKATAN

<b>AD/ART</b>	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
<b>AMPG</b>	: Angkatan Muda Partai Golkar
<b>AMPI</b>	: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
<b>BAWASLU</b>	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
<b>DPD</b>	: Dewan Pimpinan Daerah
<b>DPRD</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>GERINDRA</b>	: Partai Gerakan Indonesia Raya
<b>GOLKAR</b>	: Partai Golongan Karya
<b>HWK</b>	: Himpunan Wanita Karya
<b>IIPG</b>	: Ikatan Istri Partai Golkar
<b>INPRES</b>	: Instruksi Presiden
<b>KPPG</b>	: Kesatuan Perempuan Partai Golkar
<b>KPU</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>MDI</b>	: Majelis Dakwah Islamiyah
<b>NGO</b>	: <i>Non-Governmental Organization</i>
<b>OSP</b>	: Organisasi Sayap Partai
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>PEMILU</b>	: Pemilihan Umum
<b>PIS</b>	: Persatuan Instruktur Senam
<b>PPP</b>	: Partai Persatuan Pembangunan
<b>PROPERNAS</b>	: Program Pembangunan Nasional
<b>PTN</b>	: Perguruan Tinggi Negeri
<b>PTS</b>	: Perguruan Tinggi Swasta
<b>UU</b>	: Undang-Undang

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan demokrasi pada era modern mensyaratkan eksistensi beberapa institusi dalam penyelenggaraannya. Salah satu institusi yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi modern adalah partai politik (Saleh, 2008). Bahkan, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa tidak akan ada demokrasi dalam suatu negara tanpa adanya partai politik. Sejarah partai politik dimulai dari munculnya gagasan bahwa dalam proses politik, masyarakat merupakan bagian penting yang harus diikutsertakan. Tujuan utama dari eksistensi partai politik adalah untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan (Budiardjo, 2007). Kesimpulan dari beberapa definisi dan tujuan tersebut adalah partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatannya dalam proses politik dengan cara berpartisipasi atau berserikat di dalamnya.

Dinamika partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam partai politik masih mengalami pasang surut. Meskipun telah memasuki era demokrasi modern, perempuan masih cenderung dianggap sebagai masyarakat kelas dua dalam ranah politik pemerintahan. Secara yuridis, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984, negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Regulasi tersebut kemudian dipertegas kembali dalam UU Nomor 31 Tahun 2002, Program Pembangunan Nasional (Propernas), serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2001 yang membahas

mengenai pemberdayaan perempuan dalam partisipasinya di partai politik agar tidak diskriminatif (Habibah, 2015). Namun, realitasnya masih terdapat ketidakadilan terhadap perempuan saat memasuki arena politik.

Fenomena yang masih menjadi perbincangan di ranah publik dan politik adalah isu kesetaraan gender yang masih tampak timpang. Istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik tersebut tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural mengenai makna menjadi seorang laki-laki atau perempuan (Shalihin & Firdaus, 2019).

Berbagai permasalahan tersebut tidak menyurutkan minat perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pada era demokrasi modern, perempuan telah menjadi motor penggerak yang memberikan signifikansi dalam setiap perhelatan politik, termasuk bertindak sebagai aktor sentral dalam mempromosikan partai politik pada pemilihan umum (pemilu). Peran dan keikutsertaan perempuan ini tidak terlepas dari partai politik sebagai aktor utama. Saat ini, banyak partai politik yang telah mengadopsi hasil konvensi PBB ke dalam struktur internalnya. Secara formal, pembentukan divisi maupun organisasi sayap partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, termasuk ketentuan mengenai organisasi sayap perempuan. Hal ini memunculkan berbagai bidang atau organisasi sayap partai yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik, salah satunya melalui pembentukan divisi khusus isu perempuan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, 2011).

Terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi partai politik membentuk bidang khusus mengenai perempuan. Pertama, organisasi sayap perempuan ditujukan sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan akan representasi politik perempuan. Kehadiran organisasi sayap ini

diharapkan menjadi lumbung rekrutmen kader perempuan yang akan dicalonkan dalam perhelatan eksekutif maupun legislatif, sekaligus untuk memenuhi kebijakan *affirmative action* sebesar 30% keterwakilan perempuan. Kedua, pembentukan organisasi sayap perempuan merupakan bentuk pelembagaan partai (*institutionalisasi kepartaian*) yang bertujuan memperkuat jaringan akar rumput (*party rooting*), terutama di kalangan pemilih perempuan. Ketiga, bidang perempuan dibentuk sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi serta menghasilkan kebijakan partai yang responsif terhadap isu-isu perempuan sehingga mampu menjembatani kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan partai (Budiardjo, 2007).

Salah satu partai yang memiliki beberapa divisi maupun organisasi yang membidangi perihal isu perempuan adalah Partai Golkar. Menurut data, Partai Golkar setidaknya membidangi enam organisasi sayap partai resmi yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satuan Karya Ulama Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Himpunan Wanita Karya, dan Pengajian Al-Hidayah (Golkar, 2020). Terdapat enam organisasi sayap partai resmi yang dimiliki oleh Partai Golkar dan tiga diantaranya adalah organisasi sayap perempuan. Bahkan menurut D. Hurriyah, Partai Golkar menjadi satu-satunya partai yang memiliki hubungan formal karena memiliki kebijakan *ex-officio*. Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut telah menunjukkan kemauan untuk memberi ruang bagi perempuan.

Salah satu daerah yang memiliki kelembagaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar yang baik adalah Kabupaten Lampung Tengah. Daerah tersebut meraih tingkat kemenangan partai yang tinggi khususnya pada Pemilihan Umum 2024 sebagai partai pemenang Pemilihan Legislatif 2024 di bulan Februari 2024 lalu. Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah berhasil memperoleh 13 kursi di DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan diantaranya 4 anggota legislatif

terpilih merupakan anggota legislatif perempuan. Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki beberapa organisasi sayap partai baik formal maupun informal. Beberapa organisasi sayap partai di DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Organisasi Sayap Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Organisasi Sayap Partai	Tujuan Organisasi	Jenis Organisasi
1.	Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)	Menghimpun pemuda dalam Partai Golkar	Formal
2.	Angkatan Pembaharuan (AMPI)	Muda Indonesia Menghimpun simpatisan Partai Golkar untuk usia muda maksimal 40 tahun	Informal
3.	Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)	Partai Mekanisme sentral rekrutmen, pembinaan, dan pendayagunaan kader perempuan	Formal
4.	Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG)	Partai Menghimpun istri kader Partai Golkar yang duduk di pemerintahan	Informal
5.	Pengajian Al-Hidayah	Kegiatan sosial keagamaan perempuan di bawah naungan Partai Golkar	Formal
6.	Himpunan Wanita Karya	Wadah peningkatan/pemerataan ekonomi kader dan masyarakat	Formal
7.	Srikandi Berjaya	Organisasi sosial kemasyarakatan lintas kalangan di bawah Partai Golkar	Informal

No.	Nama Organisasi Sayap Partai	Tujuan Organisasi	Jenis Organisasi
8.	PIS (Persatuan Instruktur Senam)	Menghimpun minat olahraga senam untuk kader maupun non-kader	Informal

Sumber: Observasi dan Wawancara peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah memiliki 8 (delapan) organisasi sayap partai yang terdiri dai Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), Pengajian Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya, Srikandi Berjaya, dan PIS (Persatuan Instruktur Senam). Ada enam diantara organisasi sayap partai tersebut yang merupakan organisasi sayap partai perempuan atau didominasi oleh perempuan baik yang bersifat formal atau organisasi sayap partai yang memiliki AD/ART resmi dari pusat maupun organisasi sayap partai yang bersifat informal. Selain itu, Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki divisi atau bidang terkait perempuan sekaligus Organisasi Sayap Perempuan Partai yakni Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Organisasi sayap perempuan dalam tubuh suatu partai tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mendekatkan partai politik dengan basis pemilih perempuan, tetapi juga secara elektoral berperan dalam menjembatani kepentingan perempuan agar dapat memengaruhi kebijakan partai politik. Selain itu, secara kelembagaan, keberadaan organisasi sayap perempuan memiliki fungsi sebagai sumber rekrutmen politik dalam rangka memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya relasi atau keterhubungan (*linkage*) antara partai politik dengan organisasi sayap perempuan dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih optimal di masa mendatang (Norris, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Amdimas, F., Jendrius, J., & Maihasni, M. (2021) menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui partai politik, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan mereka di berbagai bidang, terutama dalam politik. Partai politik dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat menentukan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Metode kualitatif dengan tipe studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh dua partai politik di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Amdimas dkk., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua partai politik tersebut memberdayakan kader perempuannya melalui beberapa cara, antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader perempuan. Selain itu, partai politik juga memberikan ruang yang penuh bagi kader perempuan untuk merumuskan kebijakan dan membuat kegiatan melalui organisasi sayap partai yang khusus mengurus kebutuhan perempuan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ayunda, Lira, & Mahardika (2022) menyoroti strategi manajemen organisasi yang digunakan oleh DPD Golkar Tebing Tinggi dalam meningkatkan keaktifan kader perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPD Golkar Tebing Tinggi telah melaksanakan sejumlah strategi, termasuk kegiatan ilmiah tentang kesetaraan gender, bakti sosial yang melibatkan kader perempuan, serta pembekalan pelatihan dan pengkaderan bagi kader perempuan yang mencalonkan diri (Ayunda dkk., 2022).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Suci Indah Lestari dan Hertanto (2024) mengenai partisipasi politik perempuan dalam Pemilu

Kepala Daerah di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik lokal mengalami peningkatan, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran partai politik dan organisasi pendukung dalam meningkatkan partisipasi serta keterwakilan perempuan di tingkat daerah (Lestari & Hertanto, 2024).

Selain itu, penelitian oleh Robi Cahyadi dan Hertanto (2021) mengenai *Networking Institutionalism* oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung menunjukkan bahwa jejaring kelembagaan memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan kebijakan berbasis gender. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antaraktor politik, termasuk organisasi perempuan, dapat memperkuat posisi tawar perempuan dalam proses pengambilan kebijakan (Cahyadi & Hertanto, 2021).

Temuan-temuan penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi relasi antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik, khususnya dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas keterhubungan (*linkage*) antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik induknya di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bentuk relasi, fungsi, serta pengaruh organisasi sayap perempuan terhadap kebijakan partai politik dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut relasi antara organisasi sayap perempuan Partai Golkar dengan partai tersebut di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah. Dengan melihat bentuk hubungan, fungsi, dan pengaruh antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perempuan

dalam politik lokal dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat partisipasi mereka.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana perempuan terlibat dalam politik di tingkat lokal, serta menawarkan pandangan baru terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam partai politik. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Relasi Organisasi Sayap Perempuan Partai Dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Studi Kasus Pemilihan Legislatif 2024".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk relasi antara Organisasi Sayap Perempuan (OSP) dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Legislatif 2024?
2. Bagaimana pengaruh relasi tersebut terhadap pengambilan kebijakan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Legislatif 2024?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka telah ditentukan tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk relasi antara OSP dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah melalui pendekatan *Networking Institutionalism*.

2. Untuk menganalisis pengaruh relasi tersebut terhadap pengambilan kebijakan Partai Golkar (khususnya terkait penomoran caleg dan *zipper system*) pada Pemilihan Legislatif 2024.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian penulis dibedakan menjadi dua faktor, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan dan politik lokal, terutama yang berkaitan dengan dinamika relasi kelembagaan partai politik dan representasi politik perempuan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana teori *Networking Institutionalism* yang dikembangkan oleh Rhodes dkk. (2020) dan Bevir (2021) dapat diterapkan dalam hubungannya dengan organisasi sayap perempuan di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep representasi politik yang mengedepankan pendekatan relasional dan jaringan kelembagaan (*network-mediated representation*).

Hasil penelitian ini dengan demikian dapat menjadi referensi akademik untuk studi-studi selanjutnya yang membahas hubungan antara interdependensi jaringan internal partai dan kualitas representasi substantif perempuan di wilayah pemilihan lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dalam memperkuat dan menyempurnakan relasi kelembagaan dengan organisasi sayap perempuan di masa mendatang. Hasil evaluasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan penting bagi pengambil kebijakan internal partai dalam meningkatkan efektivitas

rekrutmen politik perempuan melalui penguatan mekanisme pleno kolegal, standardisasi sistem rekomendasi tertulis, serta penyempurnaan implementasi kebijakan afirmatif (*zipper system*) agar lebih adaptif terhadap kapasitas kader perempuan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendorong terciptanya tata kelola kepartaian yang inklusif, dengan menjadikan relasi OSP sebagai model kemitraan strategis yang dapat direplikasi di kepengurusan partai lain, baik di Provinsi Lampung maupun di wilayah Indonesia yang memiliki dinamika politik lokal serupa. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar kader perempuan dalam proses pengambilan keputusan partai melalui pendekatan yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based internal governance*).

Keterlibatan strategis organisasi sayap tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan rekrutmen, tetapi juga memastikan bahwa setiap penentuan calon legislatif dan penempatan daerah pemilihan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan gender dan kapasitas elektoral yang terukur. Di samping itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi KPU, Bawaslu, dan lembaga masyarakat sipil dalam mengawal transparansi proses rekrutmen internal partai, sehingga setiap kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dapat memiliki dampak yang terukur terhadap peningkatan kualitas demokrasi representatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan peran perempuan di internal Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah, tetapi juga menjadi acuan penting bagi pengembangan sistem kepartaian yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kesetaraan gender dalam politik lokal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kerangka Konsep

#### 2.1.1 Partai Politik

Partai politik di Negara demokrasi memiliki peran yang sangat sentral, hal ini dikarenakan kehadirannya sangat dibutuhkan dalam melakukan partisipasi politik dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan dapat menjadi penyeimbang (balance) bagi penguasa. Serta partai politik dapat pula mengelola hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi partai politik itu sendiri.

##### a) Pengertian Partai Politik

Definisi partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Carl J. Friedrich dalam (Budiardjo, 2007) berpendapat bahwa: "*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*".

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Friedrich diatas, partai politik terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama merebut atau mempertahankan kekuasaan dan terhimpun dalam wadah yang sama yaitu partai politik. Hal demikian dapat terwujud jika budaya politik yang terbangun di dalam partai politik adalah partisipatif. Tujuan partai politik sulit untuk terwujud jika anggota partai politiknya berjalan masing-masing dan tidak memiliki kerjasama yang baik.

Ahli lain, Sartori dalam (Budiardjo, 2007) menekankan pada penempatan jabatan publik oleh pada kader partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon- calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Sartori, 1976). Namun secara umum, ada kesamaan dalam setiap definisi partai politik yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Riswanda dalam (Budiardjo, 2007) kesamaan ciri tersebut adalah sebagai berikut; pertama, kumpulan orang-orang se ide dan berupaya mewujudkan ide-ide tersebut. Kedua, memiliki organisasi yang rapi, yang memiliki kontinuitas kegiatan sepanjang tahun. Ketiga, berupaya menyusun agenda kebijakan, serta berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan atas agenda tersebut. Keempat, berambisi menempatkan wakilwakilnya dalam jajaran pemerintahan untuk mewujudkan ide-idenya.

#### **b) Fungsi Partai Politik**

Selanjutnya partai politik dalam menjalankan roda aktivitas politiknya memiliki fungsi yang menjadi tugas pokok partai politik, lebih tegas Miriam Budiardjo menyebutkan fungsi partai politik sebagai berikut;

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Rekrutmen politik;
4. Pengatur konflik; (Budiardjo, 2007).

Sarana komunikasi politik menjadikan partai politik sebagai interest aggregation atau penggabungan kepentingan dari suara masyarakat yang berbeda latar belakang. Sarana sosialisasi politik merupakan proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Rekrutmen politik sendiri erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan. Pengatur Konflik menjadikan partai politik sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya dan elit politik dianggap dapat mengatasi perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah (Budiardjo, 2007). Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda Almond dan Powel menyebutkan ada tiga fungsi partai politik

1. Rekrutmen politik;
2. Sosialisasi politik;
3. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan;

Dari beberapa fungsi partai politik yang telah disebutkan diatas ada satu kesamaan fungsi partai politik intinya untuk menjadi wadah dan penyalur kepentingan masyarakat kepada pemerintah agar orientasi akhir kebijakan yang 18 dibuat pro terhadap masyarakat, di negara demokrasi fungsi partai politik sudah selayaknya seperti itu (Budiardjo, 2007).

Dalam penelitian ini kajian teoritis penulis berfokus pada fungsi partai politik yang meliputi “sarana komunikasi politik” dan “sarana sosialisasi politik”. hal ini disesuaikan dengan dimensi cultural pelebagaan partai politik yang meliputi value infus dan reification.

#### 1. Sarana Komunikasi politik

Miriam Budiardjo menjelaskan dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas yang beragam, akan memiliki dan menimbulkan aspirasi dan pendapat yang beragam pula. Pendapat dan aspirasi seseorang atau masyarakat akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila

tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini adalah interest aggregation atau penggabungan kepentingan. Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini adalah interest articulation atau perumusan kepentingan (Budiardjo, 2007) Dengan adanya agregasi dan artikulasi kepentingan ini dapat meminimalisir misinformasi dan aspirasi, serta lebih mudah menyerap dan menyalurkan kepentingan aspirasi dari grass root. Agregasi dan artikulasi itulah yang menjadi fungsi komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. selain itu partai politik memiliki peran; “Untuk memperbincangkan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat oleh pemerintah. Karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus sampai pada masyarakat sampai ke akar rumput. Oleh karena itu akan terjadi dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Diisi lain melalui komunikasi politik ini partai politik juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah. Oleh karena itu partai politik harus tanggap dalam menyampaikan kebijakan yang dibuat pemerintah dan juga aspirasi masyarakat yang perlu disampaikan pada pemerintah”. Dalam menjalankan fungsi inilah label parantara (*broker*) tersemat pada partai politik dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Terkadang Partai Politik bagi pemerintah berfungsi sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara” (Budiardjo, 2007).

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

## 2. Sarana Sosialisasi Politik

Melalui sosialisasi politik seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi politiknya. Hal ini dikarenakan akan adanya hal baru dan informasi baru terkait hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sosialisasi politik dipandang sebagai; “Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban”.

Sedangkan menurut ahli sosiologi politik M. Rush (1992) yang dikutip dalam (Budiardjo, 2007) Sosialisasi politik dipandang sebagai; Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. *Political socialization may be defined as the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena.* Proses sosialisasi berjalan seumur hidup terutama, dimulai dari masa kanak-kanak dan berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Sosialisasi politik ini juga memiliki fungsi untuk saling menerangkan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini agar generasi mendatang bisa memahami dan belajar dari nilai-nilai politik masa lalu. Banyak cara

dalam melakukan sosialisasi politik seperti bisa melalui media massa, ceramah-ceramah, penerangan, penataran kader, dan lain sebagainya.

Di sisi lain fungsi sosialisasi ini adalah untuk menciptakan citra baik bagi partai politik di dalam benak publik. Hal ini penting bagi partai politik jika ingin mendapatkan dukungan masyarakat secara maksimal, sehingga di pemilu suara partai politik tersebut dapat meningkat. Selain itu partai politik melalui fungsi sarana sosialisasi politik harus mampu mendidik kadernya sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menempatkan kepentingan pribadinya dibawah kepentingan nasional. Fungsi partai politik memiliki keterkaitan erat dengan pelebagaan partai. hal ini dikarenakan fungsi partai politik sangat berpengaruh pada peningkatan pelebagaan partai politik.

### **2.1.2 Organisasi Sayap Partai**

#### **a). Pengertian Organisasi Sayap**

Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2008).

Organisasi sayap sendiri menurut UU No. 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2008).

**b). Fungsi Organisasi Sayap**

Secara filosofis, jika merujuk pada perundangan kepartaian, hal menyangkut fungsi dan peran organisasi sayap partai sejatinya tidak memiliki rujukan cukup jelas, kecuali aspek legalitas pendiriannya sendiri. Hanya, jika dikaji lebih mendalam, penjelasan fungsi dan peran organisasi sayap partai sesungguhnya masih dapat ditelusuri berdasarkan pengertiannya, yang secara konseptual merujuk pada organisasi yang dibentuk oleh dan, atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan RT masing-masing partai politik (Isharyanto, 2017).

Dengan demikian, penjelasan tentang peran dan fungsi OSP sangat bergantung pada setiap platform masing-masing parpol, baik pada aspek ideologi, maupun AD dan ART parpol secara umum. Ditinjau dari perspektif yang lebih umum, peran dan fungsi OSP dalam sistem politik tidak dapat dilepaskan dari fakta semakin berkembangnya dinamika politik Indonesia di segala sektor. Pada ranah teoritis, organisasi sayap lahir atas dasar tujuan modernisasi partai politik dalam upaya mewujudkan satu tata kelola kepartaian yang mengedepankan semangat demokratis (Maarif, 2021)

Tujuan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa sebagai organisasi modern tertinggi, partai politik harus dapat menjadi cerminan negara demokratis, di mana prinsip-prinsip dasar tentang keterbukaan, keadilan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, kesemuanya harus dijalankan dalam keseluruhan proses kepemimpinan dan distribusi kekuasaan yang transparan. Jika merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, maka salah satu fungsi penting organisasi partai adalah bagaimana ikut berperan aktif membangun organisasi kepartaian yang betul-betul mencerminkan semangat demokratis. Sedangkan pada level praktis, organisasi sayap partai menjadi jawaban atas semakin kompleksnya perubahan sosial masyarakat (Isharyanto, 2017).

Bahwa kian beragamnya dinamika politik kontemporer, khususnya pasca dibukanya kran demokrasi, secara langsung menuntut partai politik meningkatkan eksistensi dan tanggung jawab diri sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Dalam kaitan ini, partai politik selain mengemban fungsi rekrutmen kepemimpinan, dirinya juga mengemban tanggung jawab besar lain yang tak kalah penting, seperti halnya fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik (Maarif, 2021)

Dengan begitu, pada tataran praktisnya kemunculan organisasi sayap partai dapat menurunkan beban tanggung jawab kepartaian, sehingga proses demokratisasi sistem politik nasional dapat berjalan maksimal, baik secara substansial maupun prosedural. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan keanggotaan partai dan sekaligus untuk menaikkan ketertarikan warga negara ikut bergabung menjadi anggota partai adalah dengan cara memaksimalkan peran dan fungsi organisasi sayap parpol. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pembentukan OSP itu sendiri yaitu antara lain dimaksudkan sebagai sumber kader dan pelaksana kebijakan Parpol serta penguat basis Parpol di tengah masyarakat yang saat ini cenderung kehilangan kepercayaan terhadap Parpol.

Harapan bahwa dengan OSP, minat masyarakat untuk bergabung dengan parpol akan semakin tinggi karena OSP memiliki citra yang lebih baik di mata publik dibandingkan parpol induk organisasinya antara lain karena OSP belum tercemari oleh praktek-praktek politik kotor sebagaimana telah menimpa sementara kalangan elit Parpol di DPR seperti kasus suap, pelecehan seksual serta sering membolos pada rapat-rapat DPR. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Parpol. Sayangnya, kinerja organisasi sayap (*underbow*) partai politik sejauh ini relatif tumpul dan sekadar menjadi pajangan tanpa peta kerja yang jelas.

*Underbow* partai hanya dijadikan alat untuk memberi wadah jabatan bagi segelintir elit partai sehingga kinerjanya hampir tidak ada yang menyentuh rakyat dan hanya menjalankan program-program pragmatis untuk mendapatkan jabatan dan kekayaan (Marijan, 2019). Selain itu, posisi penting dan sentral OSP sebagai sarana untuk seluas-luasnya menarik minat orang menjadi simpatisan dan/atau anggota parpol masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya ketidakjelasan pola dan tata hubungan antara OSP dengan partai politik induknya. Ketidakjelasan pola dan tata hubungan dimaksud meliputi:

- (1) Kedudukan dan fungsi OSP bagi Parpol pemiliknya;
- (2) Hak-hak dan kewajiban Parpol terhadap Pengurus, kader dan anggota OSP;
- (3) Kejelasan tentang hak-hak dan kewajiban OSP terhadap Parpol induknya;
- (4) Kejelasan tentang hak-hak OSP dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Parpol; dan
- (5) Kejelasan tentang hak-hak dan kewajiban Pengurus, kader dan anggota OSP dalam proses rekrutmen kepengurusan Parpol induknya maupun dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan publik yang menjadi kewenangan Parpol induknya. (Marijan, 2019)

Oleh sebab itu, beberapa ketidakjelasan relasi antara OSP dan Parpol induknya tersebut perlu diatur secara lebih jelas dalam masing-masing AD/ART Parpol, atau bahkan bila dirasa penting dan perlu, pengaturannya melalui UU Partai Politik. Di luar dari itu semua, di setiap negara yang menganut sistem demokratis seperti Indonesia, organisasi sayap mengambil tempat dalam pengertiannya sebagai wujud nyata partisipasi politik dan kehadiran rakyat, bahwa apa yang disebut dengan kedaulatan harus benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan atas kepentingan rakyat. Setiap tata kelola kekuasaan harus melalui keputusan

bersama, terkhusus jika bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip, seperti halnya menyangkut sirkulasi kepemimpinan. Jika mendasarkan pada kerangka pikir ini, maka kehadiran organisasi sayap pada dasarnya merupakan penerjemahan keberadaan partai politik untuk dapat menguatkan posisi rakyat, terutama dalam hal penentuan pemegang tampuk kekuasaan.

Organisasi sayap partai menjadi satu solusi di tengah minimnya keterlibatan masyarakat, atau sulitnya mereka mengakses keberadaan partai politik, yang secara konstitusional merupakan wadah utama rakyat menyampaikan aspirasi dan suara mereka. Jika logika peran dan fungsi organisasi sayap partai dibangun berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi lain OSP adalah berkedudukan sebagai organisasi yang diharapkan dapat membantu menjalankan beban tanggung jawab parpol. Merujuk pada perundangan partai politik, tepatnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sekurang-kurangnya terdapat lima (5) fungsi kepartaian yang 33 berhubungan dengan keberadaan organisasi sayap, yakni;

- (1) Pertama, fungsi pendidikan politik, artinya OSP dapat menjadi penyambung peran parpol dalam hal mendidik elemen masyarakat supaya memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>33</sup> Pendidikan politik bernilai penting karena dengannya masyarakat dapat memiliki pengetahuan cukup luas tentang arti penting politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang tinggi akan menjadikan kultur partisipasi politik menjadi emansipatif, sehingga setiap keputusan politik yang dilakukan senantiasa dibangun di atas sikap independensi melalui pertimbangan akal logis dan rasional.
- (2) Kedua, sarana komunikasi politik, kenyataan atas semakin berkembangnya dinamika politik dan kian majemuk realitas

kehidupan masyarakat, mutlak mendorong parpol melakukan pembaruan dan modernisasi di segala sektor. Fakta adanya kemajemukan dan pluralitas masyarakat, pada batasan-batasan tertentu,

- (3) Ketiga, sarana komunikasi politik, kenyataan atas semakin berkembangnya dinamika politik dan kian majemuknya realitas kehidupan masyarakat, mutlak mendorong parpol melakukan pembaruan dan modernisasi di segala sektor. Fakta adanya kemajemukan dan pluralitas masyarakat, pada batasan-batasan tertentu, akan menjadi tantangan bagi parpol menjalankan fungsi komunikasi politik secara menyeluruh dan efektif. Dalam batasan ini, keberadaan organisasi sayap dengan segala kelebihanannya merupakan salah satu wujud terobosan baru parpol untuk dapat memudahkan dirinya memasuki ruang publik, menyerap aspirasi dari lintas kalangan, lintas identitas, dan lintas daerah. Kehadiran organisasi sayap mutlak dapat memainkan peran dan fungsi strategis dalam upaya memaksimalkan peran parpol melakukan fungsinya, yakni komunikasi politik.
- (4) Keempat, miniatur sosialisasi politik, secara konseptual sosialisasi mengandung arti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Jika dilandaskan pada pembacaan ini, sosialisasi politik berarti memperkenalkan atau memasyarakatkan politik ke ranah publik. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, sosialisasi politik menjadi bagian fundamental, karena dengannya masyarakat akan dapat mengetahui secara mendalam perihal fungsi keberadaan parpol, serta arti kehadiran masyarakat dalam setiap keputusan politik. (Marijan, 2019)

### 2.1.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu konsep utama dalam kajian ilmu politik yang menjelaskan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, menjadi anggota partai politik, maupun memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2007).

Selanjutnya, Samuel P Huntington dan Joan M Nelson (1976) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, seperti mengikuti pemilu, menjadi anggota partai politik, dan mengikuti kegiatan kampanye.
2. Partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, protes, atau gerakan sosial yang bertujuan menekan pemerintah (Budiardjo, 2007).

Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela warga negara dalam memilih penguasa dan memengaruhi tindakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada aktivitas formal, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam proses politik secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, partisipasi politik perempuan difokuskan pada keterlibatan perempuan dalam organisasi sayap partai politik, khususnya Partai Golkar. Partisipasi tersebut mencerminkan bentuk partisipasi politik yang bersifat institusional, karena dilakukan dalam kerangka organisasi resmi partai.

Mengacu pada Sulasmi (2021) serta pengembangan teori partisipasi politik, indikator partisipasi politik perempuan dalam organisasi sayap partai meliputi:

1. Keanggotaan aktif

Jumlah perempuan yang terdaftar dan aktif dalam organisasi sayap partai.

2. Keterlibatan dalam kegiatan organisasi  
Partisipasi dalam rapat, pelatihan, kampanye, dan kegiatan sosial-politik.
3. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan  
Peran perempuan dalam forum musyawarah atau penentuan kebijakan internal organisasi.
4. Partisipasi dalam kaderisasi politik  
Keterlibatan dalam proses pendidikan politik dan pengembangan kader perempuan.
5. Peran dalam mobilisasi politik (*vote getter*)  
Keterlibatan perempuan dalam menarik dukungan masyarakat, khususnya pemilih perempuan. (Sulasmi, 2021)

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya bersifat kuantitatif (jumlah keikutsertaan), tetapi juga kualitatif (tingkat pengaruh dan keterlibatan).

Penelitian oleh Suci Indah Lestari dan Hertanto (2024) menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, terutama dalam keterlibatan pada kegiatan kampanye dan organisasi politik. Namun, partisipasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain: Dominasi struktur patriarki dalam partai politik, Keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan Minimnya posisi strategis yang diberikan kepada perempuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan masih cenderung bersifat partisipasi simbolik atau administratif, dan belum sepenuhnya mencapai partisipasi substantif yang mampu memengaruhi kebijakan (Lestari & Hertanto, 2024).

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Robi Cahyadi dan Hertanto (2021) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam jejaring kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas partisipasi

politik, khususnya dalam memperjuangkan kebijakan berbasis gender (Cahyadi & Hertanto, 2021).

Dengan demikian, partisipasi politik perempuan dalam organisasi sayap partai tidak hanya berfungsi sebagai sarana keterlibatan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam struktur politik partai.

#### **2.1.4 Representasi Politik Perempuan**

Representasi politik merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana kepentingan masyarakat diwakili dalam sistem politik, khususnya melalui lembaga legislatif dan partai politik. Dalam perkembangan studi politik kontemporer, representasi tidak lagi hanya dipahami sebagai keterwakilan secara jumlah, tetapi juga mencakup kualitas keterwakilan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakili.

Representasi politik adalah proses di mana individu atau kelompok bertindak atas nama orang lain dalam sistem politik. Representasi ini tidak hanya bersifat formal melalui pemilihan umum, tetapi juga substantif, yaitu sejauh mana kepentingan masyarakat benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan publik (Heywood, 2021). Representasi politik dalam demokrasi modern mencakup hubungan timbal balik antara wakil dan yang diwakili (*representative linkage*), di mana legitimasi politik ditentukan oleh kemampuan wakil dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (Evans & Stoker, 2020).

Dalam hubungannya dengan perempuan, representasi politik memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Representasi perempuan tidak hanya diukur dari jumlah

perempuan yang terlibat dalam politik, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu memengaruhi kebijakan yang responsif gender.

Sejalan dengan itu, peningkatan representasi perempuan harus dilihat dalam dua aspek utama, yaitu:

1. Representasi deskriptif, yaitu peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik;
2. Representasi substantif, yaitu kemampuan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik. (Childs, 2020).

Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam struktur partai politik menjadi sangat penting sebagai pintu masuk menuju peningkatan representasi politik perempuan di tingkat legislatif.

Mengacu pada pengembangan teori representasi politik modern serta Ida Fauziyah (2015), indikator representasi politik perempuan dalam partai politik meliputi:

1. Proporsi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai. Mengukur jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai.
2. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, Menilai sejauh mana perempuan berperan aktif dalam forum strategis partai, seperti rapat pleno dan penentuan kebijakan.
3. Distribusi jabatan strategis. Mengidentifikasi apakah perempuan memiliki akses terhadap posisi strategis atau hanya terbatas pada bidang tertentu.
4. Pengaruh terhadap kebijakan partai. Mengukur kemampuan perempuan dalam memengaruhi arah kebijakan partai, khususnya terkait isu gender.

5. Keterwakilan dalam pencalonan legislatif. Menilai implementasi kebijakan afirmatif, seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. (Fauziyah, 2015)

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa representasi politik perempuan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, yaitu berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh, dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Penelitian oleh Suci Indah Lestari dan Hertanto (2024) menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan representasi politik yang signifikan di lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi dan representasi (Lestari & Hertanto, 2024).

Selanjutnya, penelitian oleh Robi Cahyadi dan Hertanto (2021) menjelaskan bahwa penguatan jejaring kelembagaan perempuan (*Networking Institutionalism*) berperan penting dalam meningkatkan efektivitas representasi perempuan dalam kebijakan publik berbasis gender (Cahyadi & Hertanto, 2021).

Sementara itu, penelitian oleh Hertanto dan Mulyaningsih (2017) menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh dukungan struktural dari partai politik serta strategi politik yang digunakan (Hertanto & Mulyaningsih, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Representasi politik perempuan merupakan hasil dari interaksi antara faktor struktural (partai politik) dan faktor individual (kapasitas perempuan). Partisipasi politik perempuan melalui organisasi sayap partai menjadi faktor penting dalam meningkatkan representasi politik. Hubungan (*linkage*) antara

organisasi sayap perempuan dan partai politik menjadi kunci dalam memperkuat representasi perempuan, baik secara deskriptif maupun substantif.

Dengan demikian, dalam penelitian ini representasi politik perempuan diposisikan sebagai output dari proses partisipasi politik, yang dimediasi oleh hubungan kelembagaan antara organisasi sayap perempuan dan partai politik, khususnya dalam konteks Partai Golkar di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

#### **2.1.5 Politik Formal dan Informal dalam Relasi Kelembagaan Partai**

Dalam studi politik kontemporer, pemahaman tentang relasi kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara aspek formal dan informal. Politik formal merujuk pada serangkaian aturan, prosedur, struktur, dan mekanisme yang tertuang secara eksplisit dalam dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks partai politik, politik formal mencakup hierarki kepengurusan, mekanisme rapat pleno, tata cara rekrutmen calon legislatif, serta kebijakan afirmatif yang terdokumentasi seperti kuota 30% keterwakilan perempuan atau sistem *zipper*. Aspek formal ini memberikan legitimasi dan kepastian prosedural bagi aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik.

Sementara itu, politik informal mencakup praktik-praktik, norma, kebiasaan, serta jaringan hubungan personal yang tidak tertulis namun justru sering kali menentukan jalannya proses politik sehari-hari. Politik informal meliputi lobi di balik layar, negosiasi personal di ruang-ruang non-formal (seperti pertemuan di rumah makan, diskusi di kedai kopi, atau silaturahmi keluarga), pembentukan aliansi berdasarkan kedekatan emosional atau kekerabatan, serta praktik-praktik *gatekeeping* yang tidak

terdokumentasi. Dalam banyak konteks politik lokal di Indonesia, politik informal sering kali lebih berpengaruh daripada aturan formal karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk merespons dinamika sosial-budaya yang tidak tertampung dalam prosedur baku (Cahyadi & Hertanto, 2021).

Relasi antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik tidak hanya diatur oleh ketentuan formal (seperti status organisasi sayap dalam AD/ART, kebijakan *ex-officio*, atau surat keputusan DPP), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh praktik informal seperti kedekatan personal antara ketua OSP dengan pimpinan partai, kepercayaan yang terbangun melalui kegiatan sosial-keagamaan, serta akses terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan yang tidak terjadwal secara resmi. Dengan demikian, analisis tentang relasi kelembagaan dalam penelitian ini tidak cukup hanya berfokus pada aspek formal, melainkan juga harus memperhatikan dinamika politik informal yang sering kali menjadi faktor penentu efektivitas posisi tawar perempuan dalam struktur partai. Pengabaian terhadap dimensi informal dapat mengakibatkan pemahaman yang timpang tentang mengapa kebijakan afirmatif yang secara formal telah diatur sering kali tidak berjalan optimal di tingkat lapangan.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Teori *Networking Institutionalism***

Teori *Networking Institutionalism* merupakan bagian dari pendekatan *new institutionalism* yang berkembang dalam studi ilmu politik kontemporer. Pendekatan ini menekankan bahwa institusi politik tidak hanya dipahami sebagai struktur formal yang kaku, melainkan sebagai hasil dari interaksi sosial yang terbentuk melalui jaringan hubungan antar aktor (Rhodes dkk., 2020). Jaringan (*network*) dalam sistem politik merupakan pola hubungan yang relatif stabil antara berbagai aktor yang saling bergantung dalam pertukaran sumber daya, seperti

informasi, legitimasi, serta dukungan politik. Dengan demikian, kekuasaan dalam sistem politik tidak hanya berada pada struktur formal, tetapi tersebar dalam relasi antar aktor yang membentuk jaringan tersebut.

Institusi politik merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik, makna, serta interaksi antar aktor dalam jaringan. Dalam perspektif ini, jaringan menjadi arena utama terjadinya proses politik, termasuk negosiasi kepentingan dan distribusi kekuasaan (Bevir, 2021). Lebih lanjut, dalam *The Oxford Handbook of Political Institutions*, dijelaskan bahwa pendekatan kelembagaan modern melihat institusi sebagai hasil dari proses dinamis yang melibatkan interaksi formal dan informal antar aktor politik. Jaringan menjadi mekanisme penting dalam menghubungkan individu, kelompok, dan organisasi dalam sistem politik (Rhodes dkk., 2020).

Dengan demikian, teori *Networking Institutionalism* memberikan pemahaman bahwa efektivitas suatu institusi politik, termasuk partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas jaringan relasi antar aktor di dalamnya.

### **2.2.2 Karakteristik *Networking Institutionalism***

Dalam perspektif *Networking Institutionalism*, terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi dasar dalam analisis hubungan antar aktor dalam sistem politik.

1. Perspektif relasional (*relational approach*). Pendekatan ini menempatkan hubungan antar aktor sebagai unit analisis utama, bukan hanya individu atau struktur formal. Relasi tersebut menentukan bagaimana kekuasaan dan kebijakan terbentuk (Bevir, 2021).
2. Kompleksitas jaringan. Jaringan politik bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang dan kepentingan

yang berbeda. Interaksi tersebut tidak selalu bersifat hierarkis, melainkan lebih fleksibel dan dinamis (Rhodes dkk., 2020).

3. Interdependensi antar aktor. Setiap aktor dalam jaringan memiliki ketergantungan satu sama lain dalam memperoleh sumber daya politik. Tidak ada aktor yang sepenuhnya dominan karena keberhasilan sangat ditentukan oleh relasi yang dibangun (Rhodes dkk., 2020).
4. Distribusi kekuasaan dalam jaringan. Kekuasaan tidak terpusat, tetapi tersebar di antara aktor-aktor dalam jaringan. Aktor yang memiliki posisi strategis akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan (Bevir, 2021).
5. Peran norma dan aturan informal. Selain aturan formal, jaringan politik juga dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktik informal yang berkembang di antara aktor (Rhodes dkk., 2020).

### **2.2.3 Dimensi *Networking Institutionalism* dalam Penelitian**

Untuk kepentingan analisis penelitian ini, teori *Networking Institutionalism* dioperasionalkan ke dalam beberapa dimensi utama.

1. Struktur jaringan (*network structure*). Dimensi ini melihat bagaimana pola hubungan antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik, baik secara formal maupun informal. Struktur ini menunjukkan posisi strategis organisasi dalam sistem partai (Rhodes dkk., 2020).
2. Interaksi dan pertukaran (*interaction and exchange*). Dimensi ini mengkaji bagaimana komunikasi, koordinasi, serta pertukaran informasi dan sumber daya terjadi antara organisasi sayap perempuan dan partai politik (Rhodes dkk., 2020).
3. Pengaruh dan kekuasaan (*influence and power*). Dimensi ini menilai sejauh mana organisasi sayap perempuan memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan partai politik (Bevir, 2021).
4. Mobilisasi politik (*political mobilization*). Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan organisasi sayap perempuan dalam

menggerakkan partisipasi politik, khususnya dalam menghimpun dukungan pemilih perempuan (Rhodes dkk., 2020).

5. Akses terhadap sumber daya politik. Dimensi ini melihat sejauh mana organisasi sayap perempuan memiliki akses terhadap sumber daya strategis seperti jaringan elite, informasi, dan dukungan politik (Rhodes dkk., 2020).

Untuk kepentingan analisis yang terfokus dan terukur, teori *Networking Institutionalism* dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam lima dimensi utama: struktur jaringan, interaksi dan pertukaran, pengaruh dan kekuasaan, mobilisasi politik, serta akses terhadap sumber daya politik. Pemilihan kelima dimensi ini didasarkan pada prinsip relevansi langsung dengan rumusan masalah, keterjangkauan data empiris di lapangan, serta kesesuaian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang diterapkan.

Berdasarkan prinsip *bounded system* dalam studi kasus kualitatif, penelitian ini secara metodologis membatasi cakupan analisis pada dinamika internal partai dan tidak mengadopsi dimensi lain seperti *network governance*, konstruksi makna dan praktik (*meaning and practice*), dinamika historis jaringan (*historical institutional context*), maupun jaringan lintas sektor (*inter-organizational network*). Pembatasan ini dilakukan karena dimensi *network governance* lebih relevan untuk kajian kebijakan publik multi-aktor, konstruksi makna memerlukan pendekatan interpretif yang melampaui fokus deskriptif-relasional penelitian ini, dinamika historis menuntut desain longitudinal yang tidak memungkinkan dalam batasan waktu tesis magister, dan jaringan lintas sektor akan mengaburkan fokus analisis pada relasi internal partai yang menjadi inti kajian. Dengan demikian, kelima dimensi yang dipilih telah memenuhi prinsip kecukupan analitis (*analytical sufficiency*), memastikan

kedalaman pembahasan, serta menjaga konsistensi antara kerangka teori, fokus penelitian, dan tujuan yang hendak dicapai.

#### **2.2.4 Integrasi dengan Partisipasi dan Representasi Politik**

Teori *Networking Institutionalism* diintegrasikan dengan konsep partisipasi politik dan representasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan dipahami sebagai keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengikuti kegiatan partai, kampanye, serta proses pengambilan keputusan (Lestari & Hertanto, 2024). Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh akses terhadap jaringan politik yang dimiliki perempuan dalam partai.

Sementara itu, representasi politik perempuan merujuk pada sejauh mana perempuan terwakili dalam struktur kekuasaan dan mampu memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan publik (Cahyadi & Hertanto, 2021). Representasi ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif. Keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh peluang struktural, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan politik yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan memiliki peran penting dalam meningkatkan representasi perempuan (Hertanto & Mulyaningsih, 2017).

Dengan demikian, hubungan antara partisipasi politik dan representasi politik perempuan dapat dijelaskan melalui jaringan kelembagaan dalam partai politik. Semakin kuat jaringan organisasi sayap perempuan dalam partai, maka semakin besar peluang perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh representasi politik yang optimal.

### 2.2.5 Relevansi Teori dengan Penelitian

Dalam perspektif *Networking Institutionalism*, relasi antara organisasi sayap perempuan dan partai politik juga dapat dipahami sebagai bentuk interdependensi antar aktor dalam jaringan politik. Setiap aktor memiliki peran dan sumber daya yang berbeda, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan sangat ditentukan oleh kualitas interaksi dan posisi strategis dalam jaringan tersebut. Aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap jaringan dan sumber daya politik cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan (Rhodes dkk., 2020). Oleh karena itu, posisi organisasi sayap perempuan dalam struktur dan jaringan Partai Golkar menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana suara dan kepentingan perempuan dapat diakomodasi dalam kebijakan partai.

Penggunaan teori *Networking Institutionalism* dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi antara organisasi sayap perempuan dan Partai Golkar di Kabupaten Lampung Tengah secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, organisasi sayap perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktur partai, tetapi sebagai aktor dalam jaringan politik yang memiliki peran strategis dalam:

1. Meningkatkan partisipasi politik perempuan
2. Membangun komunikasi politik dengan basis pemilih perempuan
3. Mempengaruhi kebijakan partai terkait isu gender
4. Mendorong representasi perempuan dalam pemilihan legislatif

Melalui pendekatan ini, penelitian akan menganalisis bagaimana jaringan antara organisasi sayap perempuan dan partai politik membentuk pola relasi, distribusi kekuasaan, serta dampaknya terhadap keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

Teori utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah *Networking Institutionalism* yang dikembangkan oleh Rhodes dkk. (2020) dan Bevir (2021). Teori ini dipilih karena memandang

institusi politik bukan sebagai struktur hierarkis yang kaku, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan terbentuk melalui jaringan interaksi antaraktor. Dalam konteks penelitian ini, *Networking Institutionalism* dioperasionalkan ke dalam lima dimensi analitis yang secara langsung memetakan bentuk relasi OSP dengan partai induk:

1. Struktur Jaringan

Mengidentifikasi pola hubungan formal (AD/ART, mekanisme pleno, kebijakan DPP) dan informal (kepercayaan personal, pendekatan kultural, forum sosial-keagamaan) antara OSP dan struktur inti partai.

2. Interaksi dan Pertukaran

Menganalisis intensitas komunikasi, pola koordinasi, serta mekanisme pertukaran sumber daya politik (legitimasi dan akses struktural dari partai ke basis massa, data pemilih, dan kapasitas mobilisasi dari OSP).

3. Distribusi Pengaruh dan Kekuasaan

Mengukur seberapa jauh OSP memiliki posisi tawar dalam arena negosiasi internal partai, serta apakah keputusan bersifat kolegial atau tetap terpusat pada elite.

4. Mobilisasi Politik

Memetakan bagaimana jaringan OSP dikonversi menjadi kekuatan elektoral melalui pendekatan kultural, keagamaan, dan ekonomi.

5. Akses terhadap Sumber Daya

Mengkaji kesenjangan atau kesetaraan akses OSP terhadap dukungan kelembagaan, pendanaan kampanye, pelatihan kaderisasi, dan jalur rekomendasi pencalonan.

Dengan lensa teori ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan hubungan struktural, tetapi mengungkap dinamika interdependensi asimetris yang membentuk relasi hibrida antara OSP dan Partai Golkar di tingkat lokal.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian mengintegrasikan Teori Representasi Politik Perempuan (Childs, 2020;

Heywood, 2021) dan Teori Partisipasi Politik (Sulasmi, 2021; Fauziyah, 2015) dengan dimensi *Influence and Power* dari *Networking Institutionalism*. Integrasi ini diperlukan karena pengaruh relasi terhadap pengambilan kebijakan tidak dapat diukur hanya dari jaringan, melainkan harus ditinjau dari kualitas dampak kebijakan dan transformasi partisipasi menjadi kekuasaan substantif.

Pemetaan teoretis meliputi:

1. Dimensi Pengaruh dalam Jaringan (Bevir, 2021). Menganalisis mekanisme mediasi jaringan dalam proses pengambilan keputusan strategis partai, khususnya penentuan daftar calon legislatif (caleg), penetapan nomor urut (*zipper system*), dan penempatan daerah pemilihan (dapil). Teori ini menjelaskan bagaimana rekomendasi OSP disaring, dinegosiasikan, atau dikesampingkan oleh mekanisme *gatekeeping elite*.
2. Representasi Deskriptif vs. Substantif (Childs, 2020; Heywood, 2021). Mengukur apakah pengaruh relasi hanya berhenti pada keterwakilan kuantitatif (pemenuhan kuota 30% dan keterpilihan jumlah tertentu) atau telah mentransformasi menjadi representasi substantif (kemampuan memengaruhi agenda kebijakan, alokasi sumber daya kampanye yang adil, dan penempatan pascalegeratif pada komisi strategis).
3. Partisipasi Politik sebagai Mediator (Sulasmi, 2021; Fauziyah, 2015). Mengkaji bagaimana tingkat keanggotaan aktif, kaderisasi berjenjang, dan peran sebagai *vote-getter* menjadi modal yang dikonversi oleh partai menjadi kebijakan afirmatif. Teori ini membantu menjawab apakah partisipasi OSP benar-benar menggerakkan perubahan kebijakan atau hanya bersifat instrumental-temporer.

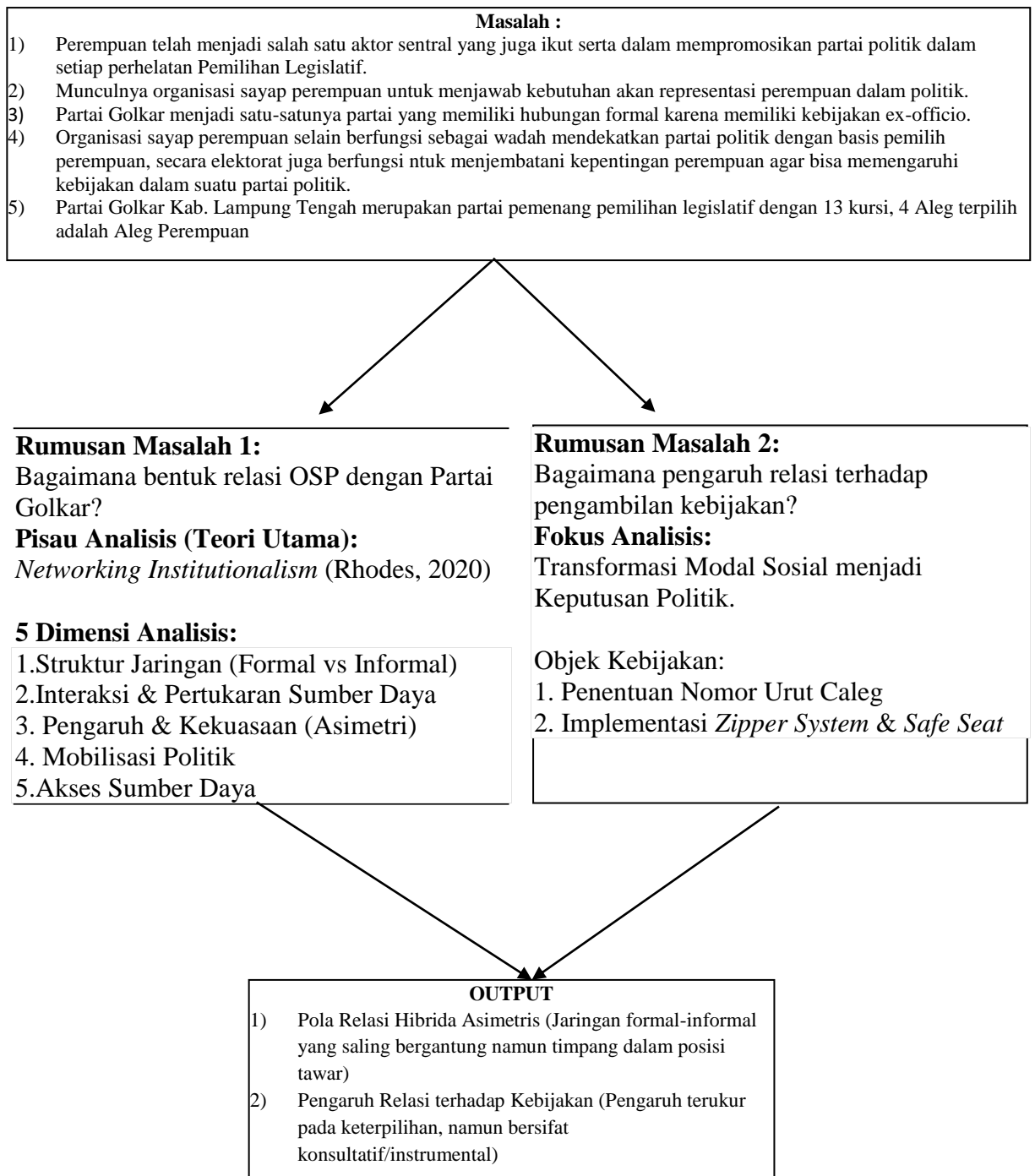
Integrasi teori ini memastikan bahwa analisis pengaruh tidak bersifat klaim normatif, melainkan terukur melalui indikator kebijakan konkret, mekanisme pleno, dan kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik lapangan.

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun secara linier untuk menjawab dua rumusan masalah secara bertahap. Alur analisis dimulai dari identifikasi masalah pertama mengenai bentuk relasi, yang dianalisis menggunakan lima dimensi teori *Networking Institutionalism* (Struktur Jaringan, Interaksi, Pengaruh, Mobilisasi, dan Akses). Output dari tahap ini adalah pemetaan Pola Relasi Hibrida yang Asimetris.

Temuan relasi tersebut kemudian menjadi variabel input untuk menjawab masalah kedua, yaitu pengaruh relasi terhadap kebijakan. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada bagaimana posisi tawar OSP memengaruhi keputusan strategis partai, khususnya penetapan nomor urut dan penerapan *zipper system*. Output akhir dari kerangka pikir ini adalah penjelasan mengenai Pengaruh Relasi terhadap Pengambilan Kebijakan yang cenderung bersifat instrumental-elektoral

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Sumber: Peneliti (2026)

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena relasi antara organisasi sayap perempuan dengan Partai Golkar di Kabupaten Lampung Tengah, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka statistik, melainkan melalui makna, interaksi sosial, serta dinamika hubungan antar aktor politik.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2021). Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, makna, dan pemahaman mendalam dibandingkan dengan pengukuran kuantitatif.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis. Pertama, objek penelitian berupa relasi politik dalam jaringan (*network*) yang bersifat kompleks, dinamis, dan tidak linier, sehingga tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel kuantitatif. Kedua, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan untuk menggali bagaimana hubungan, interaksi, serta distribusi kekuasaan terbentuk antara organisasi sayap perempuan dan partai politik.

Ketiga, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap fenomena politik lokal.

Apabila dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada hubungan sebab-akibat (*causal relationship*) serta pengujian hipotesis melalui data numerik (Sugiyono, 2021). Sementara itu, pendekatan campuran (*mixed methods*) menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, namun dalam penelitian ini tidak digunakan karena fokus penelitian tidak membutuhkan pengukuran statistik melainkan eksplorasi mendalam terhadap relasi sosial-politik.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam kajian partai politik, penelitian ini memiliki perbedaan pada penggunaan perspektif *Networking Institutionalism*, yang menekankan analisis pada jaringan relasi antar aktor, bukan hanya struktur formal kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian politik lokal, khususnya dalam memahami relasi organisasi sayap perempuan dalam jaringan kekuasaan partai politik.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dinilai tepat untuk mengkaji fenomena relasi organisasi sayap perempuan dengan partai politik secara mendalam, komprehensif, dan kontekstual. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang Relasi Organisasi Sayap Perempuan Partai Dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah relasi antara Organisasi Sayap Perempuan (OSP) dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dalam konteks Pemilihan Legislatif 2024. Secara lebih spesifik, fokus

penelitian diarahkan pada dua hal utama. Pertama, bentuk relasi yang terbangun antara OSP dan partai, yang mencakup pola hubungan formal dan informal, mekanisme komunikasi dan koordinasi, distribusi kekuasaan serta posisi tawar OSP dalam struktur partai, strategi mobilisasi politik yang dilakukan OSP, serta akses OSP terhadap sumber daya politik seperti pendanaan, pelatihan, dan jaringan elite. Kedua, pengaruh relasi tersebut terhadap pengambilan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan penentuan daftar calon legislatif perempuan, penerapan sistem *zipper* (penomoran selang-seling), penempatan daerah pemilihan, serta kontribusinya terhadap peningkatan representasi politik perempuan, baik secara deskriptif (jumlah keterpilihan) maupun substantif (kemampuan memengaruhi kebijakan publik).

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup kajian serta memastikan bahwa lokasi yang dipilih memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Penentuan lokasi juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas (keterjangkauan), efisiensi waktu dan biaya, serta kesesuaian dengan fenomena yang diteliti. Selain itu, pertimbangan etis, sosial, dan budaya juga menjadi faktor penting agar proses penelitian dapat berlangsung secara optimal dan objektif (Moleong, 2021).

Lokus penelitian ini dilakukan pada Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, khususnya dalam melihat relasi antara organisasi sayap perempuan dengan struktur partai dalam konteks Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pendekatan studi kasus (*case study*), dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan representatif (*representative case*).

Kabupaten Lampung Tengah dipilih bukan semata-mata karena kedekatan geografis, tetapi karena dinilai mampu merepresentasikan dinamika hubungan antara organisasi sayap perempuan dan partai politik di tingkat lokal. Partai Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia memiliki struktur organisasi yang kompleks, termasuk keberadaan organisasi sayap perempuan seperti KPPG, HWK, dan organisasi lainnya. Kondisi ini relevan untuk menjelaskan bagaimana relasi kelembagaan dan jaringan politik terbentuk dalam kerangka *Networking Institutionalism*, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai pola hubungan serupa di daerah lain.

b. Pertimbangan tipikal (*typical case*).

Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah dengan dinamika politik yang relatif stabil dan tidak berada dalam kondisi konflik politik yang ekstrem. Situasi ini memungkinkan penelitian dilakukan dalam kondisi yang “normal” (*typical*), sehingga data yang diperoleh tidak terdistorsi oleh konflik politik yang tinggi. Dengan demikian, hubungan antara organisasi sayap perempuan dan partai politik dapat diamati secara lebih objektif, khususnya dalam aspek partisipasi politik dan representasi perempuan dalam struktur partai dan legislatif.

c. Kesesuaian dengan proses penelusuran (*process tracing*)

Penelitian ini berfokus pada proses relasi kelembagaan antara organisasi sayap perempuan dan partai politik, termasuk dalam aspek komunikasi politik, mobilisasi, serta pengaruh terhadap pengambilan keputusan partai. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan penelusuran proses (*process tracing*) melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi langsung terhadap aktor-aktor kunci dalam partai. Hal ini penting untuk mengungkap bagaimana jaringan politik terbentuk, bagaimana distribusi kekuasaan berlangsung, serta bagaimana peran organisasi sayap perempuan dalam meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan (Moleong, 2021).

Dengan demikian, pemilihan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, tetapi juga memiliki relevansi teoritis yang kuat. Lokasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami relasi antara organisasi sayap perempuan dan partai politik dalam perspektif *Networking Institutionalism*, khususnya dalam konteks penguatan partisipasi politik dan representasi perempuan di tingkat lokal.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang didapatkan langsung dari narasumber dan mengharuskan peneliti untuk terjun ke lapangan (Sugiyono, 2021). Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara menggunakan pendekatan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang terperinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan masalah yang berkaitan dengan Relasi Organisasi Sayap Perempuan Partai Dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

b) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi antara pengurus partai dan OSP, kegiatan organisasi sayap perempuan, serta suasana rapat koordinasi atau forum konsolidasi partai. Observasi juga difokuskan pada praktik-praktik mobilisasi politik di lapangan, seperti kegiatan pengajian, senam bersama, bakti sosial, dan kampanye. Peneliti bertindak sebagai pengamat *non-partisipan* (tidak terlibat aktif dalam kegiatan) agar dapat menangkap secara alami perilaku, komunikasi, dan praktik relasi yang terjadi. Hasil observasi

dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang mencakup deskripsi kegiatan, interaksi antar aktor, serta hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat pihak lain. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan mencatat data secara langsung tentang Relasi Organisasi Sayap Perempuan Partai Dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan mencakup:

1. Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Legislatif 2024, yang memuat informasi tentang nomor urut dan daerah pemilihan calon legislatif perempuan.
2. Dokumentasi foto kegiatan organisasi sayap perempuan selama kampanye Pileg 2024.

Data dokumentasi ini digunakan untuk melakukan triangulasi dengan hasil wawancara, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik lapangan, serta memverifikasi klaim tentang penerapan *zipper system* dan keterlibatan organisasi sayap perempuan dalam pengambilan keputusan.

### **3.5 Penentuan Jenis Informan**

Menurut Sanafiah Faisal dalam (Sugiyono, 2021), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, oleh karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan	Kategori	Alasan Pemilihan
1	H. Musa Ahmad, S.Sos., M.M	Ketua DPD Golkar Lampung Tengah	Internal	Pengambil kebijakan utama partai
2	H. Mohammad Maksum, S.H	Ketua Harian Golkar Lampung Tengah	Internal	Koordinator administrasi & organisasi
3	Febriyantoni, S.E., M.M	Sekretaris DPD Golkar Lampung Tengah	Internal	Kader perempuan & pengelola keuangan
4	Ni Komang Dresty Sudiarti	Bendahara DPD Golkar Lampung Tengah	Internal	Strategi dan operasional partai
5	Hj. Purwanti, S.Pd.	Ketua KPPG	OSP	Representasi perempuan & keterkaitan langsung
6	Hj. Yurita	Ketua HWK & Anggota Legislatif Terpilih	OSP/Internal	Organisasi sayap berbasis keagamaan
7	Endang Suprihatin	Ketua Pengajian Al- Hidayah	OSP	Keterlibatan dalam organisasi perempuan
8	Hj. Mardiana	Ketua IIPG	OSP	Kaderisasi perempuan
9	Srinatu Widayati, S.Pd, M.Pd	Pengurus Srikandi Berjaya	OSP	Keterlibatan dalam kegiatan politik perempuan
10	Srinatu Widayati, S.Pd, M.Pd	Pengurus PIS	OSP	Basis mobilisasi massa perempuan
11	Ibu Hj. Aprilliati Masruri,	Dewan Kehormatan Kaukus Perempuan Politik Provinsi Lampung	Eksternal	Peran dalam representasi politik
12	Intan Kusumaningtyas	Public Education Lead di INFID	Eksternal	Keterlibatan dalam legislatif

Sumber: Observasi peneliti, 2026.

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan pra-survei lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, dan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang Relasi Organisasi Sayap Perempuan Partai Dengan Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah, sehingga mereka

akan memberikan informasi secara tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menata, mengorganisasikan, serta mempersiapkan data agar siap dianalisis secara sistematis dan mendalam. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data agar data yang diperoleh memiliki makna serta relevansi dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2021).

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Seleksi Data (*Editing*), Seleksi data dilakukan dengan cara memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, relevan, serta sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, seleksi data difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan relasi antara organisasi sayap perempuan dan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Klasifikasi Data (*Categorizing*), Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Pengelompokan data dalam penelitian ini mengacu pada dimensi teori *Networking Institutionalism*, yaitu struktur jaringan, interaksi dan komunikasi politik, distribusi kekuasaan, partisipasi politik perempuan, serta representasi politik perempuan.
3. Penyusunan Data (*Organizing*), Penyusunan data dilakukan dengan menata data secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan penelitian. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dalam

bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis serta menarik kesimpulan secara komprehensif.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model ini menekankan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2020).

Menurut (Miles dkk., 2020), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berinteraksi, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, menghilangkan data yang tidak berkaitan, serta menyederhanakan hasil wawancara ke dalam poin-poin penting. Tahap ini bertujuan agar analisis lebih terfokus pada relasi organisasi sayap perempuan dengan partai politik.
2. Penyajian Data (*Data Display*), Penyajian data dilakukan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel informan, serta matriks hubungan antar aktor dalam jaringan politik. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola relasi, interaksi, dan distribusi kekuasaan dalam organisasi sayap perempuan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap ini merupakan proses penafsiran makna data serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, dilakukan

proses verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

### **3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validitas dalam penelitian kualitatif dapat ditingkatkan melalui berbagai teknik seperti triangulasi, *member check*, serta audit proses penelitian (Creswell & Creswell, 2021). Selain itu, dalam penelitian ini juga dijaga prinsip objektivitas dengan memastikan bahwa peneliti tidak memiliki konflik kepentingan atau hubungan personal yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian tetap bersifat netral dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam rangka menjaga integritas ilmiah dan akuntabilitas penelitian, peneliti dengan ini menyatakan secara eksplisit bahwa seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dalam penelitian ini bersifat objektif dan bebas dari subjektivitas pribadi. Peneliti menjamin tidak adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) berupa hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, afiliasi politik, maupun keterikatan ekonomi antara peneliti dengan informan kunci (seperti Ketua DPD II Partai Golkar dan pengurus OSP), institusi (DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah), lokasi penelitian, maupun objek penelitian lainnya. Posisi peneliti ditetapkan sebagai pengamat independen (*independent observer*), sehingga setiap temuan, analisis, dan simpulan yang dihasilkan murni merupakan representasi dari data empiris lapangan yang telah diverifikasi, bukan hasil konstruksi atau rekayasa peneliti.

Untuk lebih memperkuat jaminan objektivitas tersebut dan memastikan keabsahan data secara metodologis, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang meliputi:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini, kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek ulang kebenaran data yang diperoleh dari berbagai informan. Data dari informan internal (seperti Ketua H. Musa Ahmad dan Ketua Harian H. Mohammad Maksum) disejajarkan dengan perspektif pengurus OSP (seperti Ketua KPPG, Hj. Purwanti dan Ketua HWK, Hj. Yurita) serta informan eksternal (akademisi dan aktivis gender seperti Hj. Aprilliati dari Kaukus Perempuan Politik dan Intan Kusumaningtyas dari INFID). Hal ini untuk mencegah bias yang mungkin timbul dari satu pihak.

b. Triangulasi Metode

Peneliti mengecek data hasil wawancara mendalam dengan data observasi perilaku (saat rapat koordinasi atau kegiatan kampanye) serta data dokumentasi (DCT Pileg 2024, AD/ART Partai, dan struktur organisasi).

c. *Member Check*

Teknik ini dilakukan dengan cara mengembalikan hasil wawancara sementara kepada informan terkait untuk dikoreksi agar data yang disimpulkan peneliti sesuai dengan maksud informan.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, transferabilitas dicapai dengan penyajian uraian rinci (*thick description*). Peneliti mendeskripsikan secara detail konteks sosial-politik Kabupaten Lampung Tengah, dinamika internal Partai Golkar, dan karakteristik organisasi sayap perempuan. Dengan uraian yang mendalam ini, pembaca (atau peneliti lain) dapat menilai sendiri apakah temuan penelitian ini dapat ditransfer atau diterapkan pada lokasi dan konteks kepertaian lain yang memiliki kemiripan struktur.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi dan stabilitas proses penelitian. Untuk menjamin dependabilitas, peneliti melakukan audit terhadap proses penelitian. Peneliti mendokumentasikan setiap tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis data. Konsistensi ini juga dijaga melalui konsultasi rutin dengan dosen pembimbing, untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan peneliti tetap berada pada jalur metodologis yang benar dan tidak menyimpang dari fokus penelitian yang telah ditetapkan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data lapangan dan bukan merupakan hasil dari bias atau preferensi subjektif peneliti. Upaya ini dilakukan dengan:

- a. Menyimpan seluruh data mentah (rekaman suara, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan foto dokumentasi) sebagai bukti otentik.

- b. Menyajikan kutipan langsung (verbatim) dari informan dalam naskah tesis untuk membuktikan bahwa simpulan peneliti berpijak pada ucapan dan fakta yang disampaikan informan, bukan opini peneliti.
- c. Melakukan reflektivitas diri, di mana peneliti secara sadar mengesampingkan prasangka pribadi mengenai peran perempuan dalam politik, dan membiarkan data yang berbicara melalui analisis *Networking Institutionalism*.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, relasi antara Organisasi Sayap Perempuan (OSP) dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk relasi antara Organisasi Sayap Perempuan (OSP) dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Legislatif 2024 bersifat interdependen namun asimetris. Dari dimensi struktur jaringan, relasi membentuk pola hibrida yang mengintegrasikan mekanisme formal (AD/ART, pleno) dengan jaringan informal berbasis kepercayaan personal dan pendekatan kultural, namun stratifikasi status formal-informal menyebabkan OSP informal tidak memiliki mandat pengawasan. Dimensi interaksi dan pertukaran menunjukkan komunikasi dua arah yang intensif dengan partai menyediakan legitimasi struktural dan OSP menyediakan data basis pemilih, namun pertukaran ini lebih bersifat sektoral dan instrumental sehingga OSP lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan elektoral daripada mitra kebijakan otonom. Dari dimensi pengaruh dan kekuasaan, keputusan strategis partai tetap terkonsentrasi pada lingkaran elite inti melalui mekanisme *gatekeeping*, sementara kebijakan *ex-officio* DPP tidak berjalan di tingkat lokal sehingga rekomendasi OSP hanya bersifat konsultatif dan tidak mengikat secara prosedural. Dimensi mobilisasi politik menunjukkan bahwa OSP efektif sebagai mesin konversi modal sosial (pengajian, senam, bakti sosial) menjadi modal elektoral melalui pendekatan kultural dan religius, namun mobilisasi bersifat situasional dan temporer. Dimensi akses sumber daya mengungkap asimetri yang tajam: OSP formal memiliki akses terbatas ke pleno dan

dukungan logistik, sementara OSP informal mengandalkan swadaya dan lobi personal, serta pendidikan politik berjenjang tidak tersedia bagi anggota basis. Dengan demikian, bentuk relasi OSP dengan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah adalah interdependen namun asimetris, di mana OSP berperan kuat dalam mobilisasi dan artikulasi aspirasi tetapi memiliki posisi tawar terbatas dalam pengambilan keputusan strategis partai.

2. Pengaruh relasi OSP terhadap pengambilan kebijakan partai pada Pemilihan Legislatif 2024 bersifat nyata (terukur) namun terbatas pada fungsi konsultatif. Dari dimensi struktur jaringan, hierarki yang selektif menyebabkan hanya OSP formal yang memiliki akses terbatas ke forum kebijakan inti, sehingga kebijakan afirmatif seperti kuota 30% dan *zipper system* diterapkan secara parsial dengan penempatan nomor strategis masih didominasi oleh kader yang memiliki modal elektoral personal atau jabatan struktural. Dimensi interaksi dan pertukaran menunjukkan bahwa aliran informasi dua arah berhasil memasukkan rekomendasi OSP sebagai *input* kebijakan, namun tidak sampai pada tahap ko-decisional sehingga kebijakan final (penentuan caleg, nomor urut, dapil) tetap ditentukan oleh elite partai tanpa mekanisme deliberasi yang mengikat OSP. Dari dimensi pengaruh dan kekuasaan, OSP berhasil mendorong penerapan kebijakan afirmatif prosedural dan berkontribusi pada keterpilihan empat anggota legislatif perempuan (representasi deskriptif), tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan agenda substantif partai, alokasi anggaran kampanye yang adil, atau penempatan pascalegeratif pada komisi strategis. Dimensi mobilisasi politik memberikan *bargaining power* sementara yang efektif pada masa kampanye karena elite partai menyadari ketergantungan elektoral pada jaringan OSP, namun pasca pemilu mobilitas menurun dan pengaruh terhadap kebijakan jangka panjang melemah. Dimensi akses sumber daya mengonfirmasi bahwa asimetri pendanaan dan pelatihan menyebabkan OSP informal tidak

memiliki kapasitas kelembagaan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data yang kompetitif, sehingga pengaruh OSP sangat bergantung pada inisiatif personal dan kedekatan dengan elite. Dengan demikian, pengaruh relasi OSP terhadap kebijakan partai bersifat nyata pada representasi deskriptif namun terbatas pada fungsi konsultatif, dan belum mampu mengubah arsitektur kekuasaan internal partai secara struktural menuju representasi substantif yang setara dan berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merumuskan saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

### 1. Best Practice Kualitas Demokrasi Internal Partai

Partai politik perlu menggeser paradigma relasi dari *instrumental-mobilisational* menjadi *strategic-collaborative*. Hal ini dapat diwujudkan dengan menginstitutionalisasi forum pleno kolegal yang mengikat secara prosedural, di mana rekomendasi OSP memiliki bobot validasi elektoral yang terstandar dan tercatat dalam risalah rapat. Partai harus menjamin keterlibatan OSP tidak hanya pada fase kampanye, tetapi juga dalam penyusunan platform kebijakan, evaluasi program pascapemilu, serta audit transparansi alokasi sumber daya kampanye kader perempuan.

### 2. Perbaikan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan

DPP Partai dan DPD tingkat kabupaten perlu merevisi AD/ART atau menerbitkan Surat Keputusan internal yang menjamin implementasi kebijakan *ex-officio* secara ketat, melarang pengisian jabatan strategis bidang perempuan oleh non-OSP, serta mewajibkan transparansi mekanisme pleno penentuan caleg. Regulasi ini harus mencakup mekanisme pertanggungjawaban jika rekomendasi kelembagaan OSP diabaikan tanpa justifikasi elektoral yang terverifikasi secara tertulis.

Standardisasi ini akan mencegah personalisasi keputusan dan memperkuat akuntabilitas tata kelola partai.

3. *Policy Brief* untuk Partai Politik & Lembaga Pengawas Pemilu  
 Disusunnya *Policy Brief: Standar Prosedur Operasional (SOP)* Rekrutmen & Penempatan Caleg Perempuan Berbasis Jaringan OSP yang mencakup: (a) implementasi *zipper system* yang teraudit dan terdokumentasi, (b) kewajiban publikasi peta basis massa & data elektoral sebagai dasar objektif penempatan daerah pemilihan, (c) transparansi proporsional alokasi dana kampanye dan logistik kemenangan bagi kader perempuan, serta (d) mekanisme *grievance redress* bagi OSP yang merasa rekomendasi kelembagaannya diabaikan. KPU dan Bawaslu dapat mengadopsi *policy brief* ini sebagai pedoman monitoring kepatuhan afirmatif gender dan integritas proses rekrutmen internal partai.
4. Penguatan Prosedur Kaderisasi dan Transformasi Representasi Substantif  
 Partai dan OSP perlu mengembangkan program kaderisasi berjenjang yang terstruktur, terukur, dan tidak terbatas pada elite pengurus. OSP harus difasilitasi modul legislasi, advokasi kebijakan responsif gender, negosiasi anggaran daerah, serta *capacity building* kepemimpinan strategis. Pascalegeratif, partai harus menjamin penempatan kader perempuan terpilih pada komisi strategis (anggaran, perencanaan, hukum, dan pemerintahan) dan bukan hanya komisi sosial-humaniora. Langkah ini krusial untuk memastikan transformasi representasi deskriptif menjadi substantif yang berdampak pada kebijakan publik.
5. Kontribusi Akademis dan Pengembangan Ilmu Pemerintahan  
 Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris bagi pengembangan teori *Networking Institutionalism* dalam konteks politik lokal Indonesia, khususnya dalam memetakan batasan jaringan interdependen ketika berhadapan dengan budaya politik elitis-patriarkal. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan

komparatif lintas partai atau desain longitudinal untuk menguji generalisasi temuan, serta mengukur dampak jangka panjang dari institusionalisasi mekanisme rekomendasi OSP terhadap kualitas demokrasi representatif dan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amdimas, F., Jendrius, J., & Maihasni, M. (2021). Pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4849–4856.
- Ayunda, L., Lira, & Mahardika, A. (2022). Strategi manajemen organisasi dalam upaya meningkatkan keaktifan kader perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 2(1), 33–44.
- Bevir, M. (2021). *Governance and governmentality*. London: Routledge.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyadi, R., & Hertanto. (2021). *Networking Institutionalism* oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam mengoptimalkan kebijakan gender. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 46–57.
- Childs, S. (2020). *Women, representation and politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Evans, M., & Stoker, G. (2020). *Theory and methods in political science* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Fauziyah, I. (2015). *Peran perempuan dalam politik dan kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Golkar. (2020). *Organisasi sayap Partai Golkar*. Jakarta: DPP Partai Golongan Karya.
- Habibah, S. (2015). Partisipasi dan peran perempuan dalam partai politik. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2), 342–366.
- Hertanto, & Mulyaningsih, H. (2017). Bupati perempuan pertama di Lampung dan kegagalan calon petahana. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 100–118.

- Heywood, A. (2021). *Politics* (5th ed.). London: Macmillan Education.
- Isharyanto. (2017). *Hukum partai politik dan pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Lestari, S. I., & Hertanto. (2024). Partisipasi politik perempuan dalam pemilu (kada) 2024 di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 112–125.
- Maarif, S. (2021). *Dinamika partai politik dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rhodes, R. A. W., Binder, S., & Rockman, B. (2020). *The Oxford handbook of political institutions*. Oxford: Oxford University Press.
- Sartori, G. (1976). *Parties and party systems: A framework for analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shalihin, & Firdaus. (2019). Transformasi gender: Strategi pembebasan perempuan dari jerat pembangunan dan kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 45–62.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmi. (2021). *Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12. Jakarta: Sekretariat Negara.